

**PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA
KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA
PEMATANGSIANTAR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Sudi Akuntansi*



OLEH :

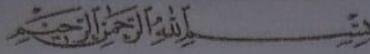
NAMA : FILDZAH IKRAMI

NPM 1705170287

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

KONSENTRASI : SEKTOR PUBLIK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 16 Oktober 2021, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : **ERDZAH IKRAMI**
NPM : **1705170087**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI SEKTOR PUBLIS**
Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA FINANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA KEWASIHAN SIANTAR TIMUR KOTA Pematangsiantar)**

Dinyatakan : **1. Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, SE., Ak. BMSI

(H. ISLAMAB FAHMI, SE., M.Si. Ak. CA/CPA)

Pembimbing

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si. Ak. CA)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : FILDZAH IKRAMI
NPM : 1705170287
Program Studi : AKUNTANSI
Konsetrasi : AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
Judul Skripsi : PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANGSIANTAR)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

(Dr. EKA NURMALA SARI, SE., M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Dr. ZULIA HANUM, SE., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(Dr. JANURI, SE, MM, M.Si)



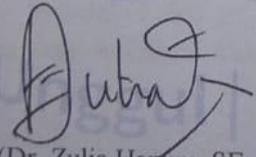
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

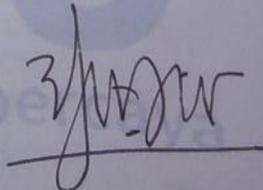
Nama Mahasiswa : Fildzah Ikrami
NPM : 1705170287
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Fenomena masalah harus di dukung data dan harus dijelaskan di latar belakang penelitian. 2. Tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah.	20 AGUSTUS 2021	3/
Bab 2	1. Teori tentang variabel yang di teliti harus rinci, buang yang tidak perlu. 2. Kerangka konseptual harus didukung artikel penelitian	20 AGUSTUS 2021	3/
Bab 3	jumlah sampel ada berapa orang - 40 validasi 2 revalidasi per bab 3	20 AGUSTUS 2021	2/
Bab 4	perhatikan kembali yg diminta - analisis data di perhatikan lagi. perhatikan.	13/10 21	3/
Bab 5	kembali juga lagi ada angka.	13/10 21	3/
Persetujuan Sidang Meja Hijau	-		

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, Oktober 2021
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3, Medan, Telp. (061) 6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fildzah Ikrami
NPM : 1705170287
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan

Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	- identifikasi masalah pahl.	10 ²¹	2/
Bab II	- teori ditambal.	10 ²¹	2/
Bab III	ura validasi & bentuk pahl pahl.	10 ²¹	2/
Bab IV	penelitian ditambal lagi pahl lebih banyak	10 ²¹	2/
Bab V	subbab lengkap	10 ²¹	2/
Daftar Pustaka	menyalay, 2011 dosen user	10 ²¹	2/
Persetujuan Sidang Meja Hijau			

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 14 Oktober 2021
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3, Medan, Telp. (061) 6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fildzah Ikrami
NPM : 1705170287
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan
Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada
Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab I	—		
Bab II	—		
Bab III	—		
Bab IV	peubah ke ditambahkan loss	10 ²¹	2/-
Bab V	peubah lengkap	10 ²¹	2/-
Daftar Pustaka	—		
Persetujuan Sidang Meja Hijau	see draft skripsi lengkap ke sidang	7 ¹⁰ ²¹	2/-

Diketahui oleh :
Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 14 Oktober 2021
Disetujui Oleh :
Dosen Pembimbing

(Dr. Eka Nurmala Sari, SE., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : **FILDZAH IKRAMI**

NPM : 1705170287

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bawah skripsi saya yang berjudul **“PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN PENGAWASAN INTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (STUDI EMPIRIS PADA KECAMATAN SIANTAR TIMUR KOTA PEMATANG SIANTAR”** adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



FILDZAH IKRAMI

ABSTRAK

Fildzah Ikrami. 1705170287 Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar)

Tujuan dari Penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah kecamatan siantar timur, Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, Kantor Tempat Penelitian adalah kecamatan Siantar Timur, Penelitian ini berlangsung dari Waktu yang digunakan untuk penelitian ini pada bulan Juli sampai Oktober 2021, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kecamatan siantar timur yang tersebar di 7 kelurahan Siantar Timur yang berjumlah 60 orang, samplin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh dimana semua populasi jadi sample, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah , Dalam penelitian ini penerapan standart akuntansi sektor publik (X_1) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) hal ini terlihat $t\text{-hitung} = 3,676 > t\text{-tabel} = 2,00$ dan nilai sig $0,002 < \alpha 0,05$, Dalam penelitian ini pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur hal ini terlihat dari $t\text{-hitung} = 3,610 > t\text{-tabel} = 2,00$, Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig adalah $0,003$ yang lebih rendah dari $0,05$ dan Terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur terlihat dari nilai $f\text{-hitung} = 14,394 > f\text{-tabel} = 3,16$. dan taraf signifika yang bernilai sig $0,000 < \alpha 0,05$, R-square dimana nilai R square pada tabel diatas bernilai $0,414$ atau senilai $41,4\%$ besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas (penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal) terhadap variabel terikat (kinerja instansi) sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini

Kata Kunci : penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal dan kinerja instansi

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas Ridho dan Hidayah-Nya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan dan keselamatan, serta shalawat beriring salam kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.

Proposal skripsi ini adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) dan memperoleh gelar S.ak Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dalam pembuatan proposal skripsi ini, penulis banyak mendapatkan doa dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Terutama penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orangtua ayah saya tercinta Syafruddin dan bunda Samsidar Perangin-angin yang telah mendukung penulis dalam setiap apapun yang telah mendoakan dan mengorbankan tenaga dan materi untuk bisa membuat penulis bisa sampai kejenjang pendidikan ini dan kepada abang Rifqi Ariga, mbak Dara puspita dan pacar saya Muhammad iqbal sampurno beserta keluarga yang telah mendukung mendoakan serta membantu penulis dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu, diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussansi, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

2. Bapak H. Januri, SE.,M.M.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Ade Gunawan, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE.,M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Ibu Dr Zulia Hanum, SE., M.Si., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak Riva Ubar S.E, M.Si., Ak., CA., CPA selaku Sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari,SE.,M.Si.,Ak,CA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Bapak Ibu dosen staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
9. Sahabat-sahabat saya Nova, Farra, Lili, Aim, Yana, Dewi, Rama beserta teman-teman yang lain yang telah memberikan semangat, dukungan dan berjuang bersama-sama dalam menyelesaikan proposal skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dan Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih memiliki kekurangan. Dengan demikian besar harapan penulis untuk

saran dan kritik dari berbagai pihak guna untuk perbaikan di masa akan datang.

Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Amin Ya Rabbal'alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Juli 2021
Penulis

FILDZAH IKRAMI
1705170287

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Rumusan Masalah	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Uraian Teori	11
2.1.1 Akuntansi sektor publik.....	11
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi sektor publik	11
2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntansi sektor publik	12
2.1.1.3 Karakteristik Akuntansi sektor publik	13
2.1.1.4 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik	14
2.1.2 Pengawasan Internal.....	17
2.1.2.1 Pengertian Pengawasan Internal	17
2.1.2.2 Tujuan Pengawasan Internal	18
2.1.3 Kinerja Instansi Pemerintah	19
2.1.3.1 Pengertian Kinerja Instansi Pemerintah.....	19
2.1.3.2 Manfaat Kinerja Instansi Pemerintah.....	20
2.1.3.3 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah.....	21
2.1.3.4 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah	21
2.1.4 Penelitian Terdahulu	22
2.2 Kerangka Konseptual	25
2.3 Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Definisi Operasional Variabel	30
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	33

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian.....	34
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Uji Kualitas Data	35
3.7 Teknis Analisis Data	35
BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan	45
4.1 Hasil Penelitian.....	45
4.2 Pembahasan	63
BAB V Kesimpulan dan Saran	70
5.1 Kesimpulan.....	70
5.2 Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantar Timur	5
Tabel II.1 Penelitian Terdahulu.....	22
Tabel III.1 Definisi Operasional Variabel.....	31
Tabel III.2 Model Skala Likert.....	33
Tabel III.3 Waktu Penelitian	33
Tabel III.4 Kelurahan Kecamatan Siantar Timur.....	34
Tabel III.5 Hasil Validitas penerapan akuntansi sektor public.....	37
Tabel III.6 Hasil Validitas Pengawasan internal	37
Tabel III.7 Hasil Validitas kinerja instansi.....	38
Tabel III.8 Uji Realibilitas Instrument	39
Tabel IV.1 Jenis Kelamin.....	48
Tabel IV.2 Usia	48
Tabel IV.3 Pendidikan Responden.....	49
Tabel IV.5 Kriteria Jawaban Responden.....	50
Tabel IV.6 Persentase Responden Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik.....	50
Tabel IV.7 Persentase Jawaban Variabel Pengawasan Internal	52
Tabel IV.8 Persentase Jawaban Variabel Pengawasan Internal	53
Tabel IV.9 Coefficients	55
Tabel IV.10 Coefficients	57
Tabel IV.11 Coefficients	59
Tabel IV.12 Anova.....	61
Tabel IV.13 Model Summary.....	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Paradigma Penelitian	28
Gambar IV.1 Normalitas	56
Gambar IV.2 Heterodekasitas	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014: 2). Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang relatif luas dan kompleks di bandingkan dengan sektor swasta/bisnis. Peranan akuntansi sektor publik di tujukan untuk memberikan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik. Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan swasta. Akan tetapi, untuk peranan dan tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat diganti oleh sektor swasta.

Haryanto, dkk. (2017:1) menyatakan, jika diamati secara lebih mendalam, akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian

kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah juga berdampak luas pada bidang ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi, perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mendorong perbaikan iklim investasi, sedangkan dalam bidang politik perbaikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mampu memperbaiki tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya laporan keuangan yang baik pusat maupun daerah, sudah seharusnya dikelola dengan baik, transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan keuangan tersebut menjadikannya sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Pengawasan Intern ini dibedakan atas pengawasan yang bersifat akuntansi dan administratif.

Pengawasan intern merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui bahwa suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah

ditetapkan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya good governance dan clean government dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengawasan intern di lingkungan pemerintah provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan oleh inspektorat pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk kepentingan gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya.

Menurut Arifin Sabeni dan Iman Gozali (1997; 67) pengawasan intern merupakan suatu alat dari pemimpin organisasi yang bersangkutan untuk mengawasi apakah kegiatan-kegiatan bawahannya telah sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan (Wawan dan Lia; 2009). Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata mata dari pespektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Mardiasmo, 2004). Instruksi presiden no. 15 tahun 1983 menyebutkan ada dua jenis pengawasan, yaitu pengawasan atasan langsung dan pengawasan fungsional. Pengawasan atasan langsung dimaksud dapat melakukan pengamatan setiap saat yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi bawahan, disertai pemberian petunjuk atau tindakan korektif bila diperlukan. Sedangkan pengawasan fungsional dimaksud pengawasan yang dilakukan oleh suatu

aparatus/unit organisasi yang dibentuk atau ditugaskan untuk melakukan pengawasan dalam batas-batas lingkungan kewenangan yang ditentukan.

Semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi organisasi pemerintah, maka keberadaan lembaga-lembaga tersebut semakin diperlukan, namun apakah dengan jumlah lembaga-lembaga pengawasan yang cukup banyak dan pelaksanaan pengawasan yang belapis-lapis dapat memperoleh hasil yang efektif, oleh karena inilah semakin banyaknya waktu yang harus disediakan hanya untuk melayani aparat pengawasan. Hal-hal seperti ini yang harus dipikirkan dan dicarikan solusinya untuk kepentingan yang lebih luas, apakah dengan melakukan penyederhanaan terhadap lembaga-lembaga pengawasan yang ada ataukah membuat suatu aturan yang jelas dan tegas dengan tetap berpegang teguh pada upaya-upaya peningkatan kinerja pemerintah (Ihya'ul Ulum MD 2004 : 85).

Penelitian mengenai pengaruh akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah menyimpulkan hasil yang berbeda. Studi Bambang (2012), Putri (2015), Intan (2015) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi keuangan sektor publik berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian Astari (2015) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh negatif terhadap kinerja instansi pemerintah.

LAKIP merupakan suatu laporan kinerja instansi yang bersifat vertical yaitu laporan kepada instansi yang di atasnya dan kepala Lembaga Administrasi Negara dan BPKP. Alur pelaporan LAKIP untuk pemerintah kota dan kabupaten sesuai dengan inpres No.7 Tahun 1999 (Sihaloho, F.Laurensius dan Halim, 2010). Berikut LAKIP Kecamatan Siantar Timur Tahun 2019-2020.

Tabel 1.1
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantar Timur Tahun 2019-2020

Komponen yang Dinilai	Nilai		Keterangan
	2019	2020	
a. Perencanaan kinerja	96,27	91,13	-5,14
b. Pengukuran kinerja	85,28	86,64	1,36
c. Pelaporan kinerja	96,87	99,29	2,42
d. Evaluasi kinerja	96,79	89,88	-6,09
e. Capaian kinerja	83,12	80,25	-2,87
Tingkat Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	-

Berdasarkan table 1,1 dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan siantar timur secara umum mengalami peningkatan. Namun, beberapa komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja menurun, Selain itu juga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III, IV, dan individu pegawai.
2. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran. Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan dan pemilihan program/kegiatan yang mendukung tujuan dan sasaran.
3. Meningkatkan kualitas pengukuran terhadap output dan outcome secara berkala untuk memastikan tercapainya kinerja sasaran organisasi Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara

berkala oleh pimpinan, sehingga mampu menyujudkan efektivitas program kinerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi.

4. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja OPD yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan efisiensi anggaran.
5. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD sehingga dapat tercipta pemahaman yang merata antar OPD, serta kepada Bappeda dan para penanggung jawab program untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi program untuk mendorong efektivitas pencapaian sasaran dan efisiensi penggunaan anggaran.
6. Meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pimpinan OPD terhadap penerapan manajemen kinerja organisasi sehingga mampu meningkatkan pencapaian kinerja organisasi.
7. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai dasar pemberian reward dan punishment.

Hasil kerja instansi pemerintah yang telah dicapai merupakan perwujudan dari implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas kinerja masing-masing instansi pemerintah tersebut. Informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah karena berdasarkan informasi tersebut, pemerintah mempunyai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik lagi. Informasi tersebut

juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban Kepala Pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPRD disetiap akhir tahun dan diakhiri jabatan kepala pemerintah.

Pengawasan internal dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP). Pengawasan internal di kecamatan siantar timur dilakukan oleh Inspektorat Siantar. Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengadakan suatu pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengawasan intern dilakukan sebagai upaya menunjang dan memperkuat efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern, Fungsi dari Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul **“Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi empiris pada kecamatan Siantar Timur kota Pematangsiantar).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Siantar Timur secara umum mengalami peningkatan dari 2019-2020. Namun, beberapa komponen penilaian pada aspek perencanaan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja menurun cukup tinggi.
2. Kantor Kecamatan Siantar Timur telah melakukan revidi, terhadap program, kegiatan dan anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran, namun hasil dari revidi tersebut beberapa program dan kegiatan masih belum berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan hasil capaian kinerja dari tahun sebelumnya.
3. Kantor Kecamatan Siantar Timur harus meningkatkan penyajian Penerapan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan yang terbuka untuk publik dikarenakan adanya penurunan evaluasi kinerja yang akan berdampak menurunnya kepercayaan publik.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik terhadap Kinerja Instansi pemerintah Pada kecamatan Siantar Timur?
2. Bagaimana pengaruh Pengawasan internal terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada kecamatan Siantar Timur?
3. Bagaimana pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan internal terhadap Kinerja Instansi pemerintah Pada kecamatan Siantar Timur?

1.4 Tujuan Penelitian

Mengacu pada poin-poin permasalahan yang di kemukakan pada rumusan masalah diatas. Maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penerapan akuntansi sektor publik terhadap kinerja instansi pemerintah kecamatan siantar timur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah kecamatan siantar timur
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengawasan internal dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah kecamatan siantar timur

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan peneliti mengenai Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah atas fakta yang terjadi selama penelitian, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di kecamatan Siantar Timur.

2. Bagi instansi pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang bermanfaat bagi pihak instansi pemerintahan dalam memecahkan masalah yang sedang dihadapi instansi dan memperbaiki kendala yang ada dalam menyelesaikan kinerja sehingga dapat mencapai tujuan instansi secara optimal.

3. Bagi Pembaca dan Penelitian selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang meneliti masalah yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Bastian (2014: 2) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta.

Menurut Halim dan Muhammad (2018: 3) bahwa akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain

publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan. Yayasan organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Jenis-jenis Akuntansi Sektor Publik

Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

a) Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya: (1) Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain; serta (2) Lembaga dan badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

b) Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

2) Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah. Contohnya: (a) Perguruan tinggi BHMN; (b) Rumah sakit milik pemerintah seperti RSCM, RS Daerah; dan (c) Yayasan-yayasan milik pemerintah. Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

3) Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta.

Contohnya: (a) Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain; (b) Sekolah dan universitas swasta; dan (c) Rumah sakit milik swasta.

2.1.1.3 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik menurut Biduri (2018: 5)

2.1.1.4 Elemen-elemen Akuntansi Sektor Publik

Bastian (2014: 12) menjelaskan bahwa elemen-elemen akuntansi sektor publik memiliki rangkaian siklus, antara lain :

1) Perencanaan Publik

Dalam bagian ini, hal-hal pokok yang wajib diketahui adalah perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, yaitu melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sebagaimana tertuang dalam UU RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 1 Poin 1. Lebih dari itu, proses perencanaan yang dilaksanakan tersebut akan menentukan aktivitas dan fokus strategi organisasi sektor publik. Dalam prosesnya, memang perencanaan membutuhkan partisipasi publik yang akan sangat menentukan kualitas serta berterimanya arah dan tujuan organisasi.

Lebih implisit, inti dari perencanaan adalah mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan.

2) Penganggaran Publik

Berdasarkan penjelasan UU Nomor 17 Tahun 2003, anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan supaya mencapai tujuan bernegara.

Lebih dari itu, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran organisasi agar pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, organisasi tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pengelola atau pengguna anggaran dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran.

3) Realisasi Anggaran Publik

Secara teori, realisasi anggaran publik merupakan pelaksanaan anggaran publik yang telah direncanakan dan ditetapkan dalam bentuk program dan kegiatan nyata. Hal ini berarti fokus pelaksanaan anggaran terletak pada operasionalisasi program atau kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Selain itu, realisasi anggaran menunjuk pada arahan atau pengendalian sistematis dari proses-proses yang mengubah *input* menjadi barang dan jasa. Dalam hal ini, proses tersebut sangat terkait erat dengan kualitas keluaran.

4) Pengadaan Barang dan Jasa Publik

Pengadaan barang dan jasa publik adalah proses, cara, serta tindakan dalam menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat atau publik. Barang dan jasa yang disediakan merupakan bentuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat

5) Pelaporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi. Sebagai konsekuensinya, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan

menggambarkan pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja, serta realisasi pembiayaan.

6) Audit Sektor Publik

Secara umum, pemeriksaan atau auditing adalah suatu investigasi independen terhadap beberapa aktivitas khusus. Mekanismenya adalah memosisikan dan menggerakkan makna akuntabilitas dalam pengelolaan sektor pemerintahan, badan usaha milik negara (BUMN), instansi pengelola aset negara lainnya, ataupun organisasi publik nonpemerintah, seperti partai politik, LSM, yayasan, dan organisasi di tempat peribadatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengekspresikan suatu opini secara jujur mengenai posisi keuangan, hasil operasi, kinerja, dan aliran kas yang disesuaikan dengan prinsip akuntansi berterima umum. Maka itu, laporan auditor merupakan media yang mengekspresikan opini auditor atau dalam kondisi tertentu bisa juga menyangkal suatu opini.

7) Pertanggungjawaban Publik

Dalam organisasi sektor publik, pertanggungjawaban atau akuntabilitas adalah pertanggungjawaban tindakan dan keputusan dari para pemimpin atau pengelola organisasi sektor publik kepada pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat yang memberikan amanah kepadanya berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku.

2.1.2 Pengawasan Internal

2.1.2.1 Pengertian Pengawasan Internal

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa: pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Siagian dikutip (Kadarisman, 2013: 172) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018: 370) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal.

Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna. Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan,

hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2.1.2.2 Tujuan pengawasan Internal

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “pengawasan dari dalam (Internal Control) dan pengawasan dari luar (Eksternal Control) Pengawasan dari dalam (Internal Control) berarti “ pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit Pengawasan yang terbentuk didalam organisasi itu sendiri. Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan organisasi.

Menurut Mulyadi dalam Sartika (2019) menyatakan bahwa tujuan Pengawasan internal meliputi

- 1) keandalan pelaporan keuangan
- 2) Efektifitas dan efisiensi operasi
- 3) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Dari defenisi – defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dalam suatu lembaga pendidikan merupakan fungsi staf yang melakukan penilaian secara bebas atau tidak memihak dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya tersebut kepada manajemen sebagai suatu jasa pelayanan, dan bertanggung jawab penuh kepada manajemen.

2.1.3 Kinerja instansi Pemerintah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja instansi Pemerintah

Istilah kinerja berasal dari job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang), atau juga hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara 2015: 67).

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara illegal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Prawirosentono (2008:2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Mulyadi (2015: 63) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno (2015: 151) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing- masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

2.1.3.2 Manfaat kinerja instansi pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009: 7) bahwa manfaat pengukuran kinerja antara lain sebagai berikut.

- 1) Pengalaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
- 2) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
- 3) Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
- 4) Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang Memberikan telah disepakati.
- 5) Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
- 6) Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.

2.1.3.3 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Biduri (2018: 139) menyatakan bahwa indikator kinerja (*performance indicator*) sering disamakan dengan ukuran kinerja (*performance measure*). Namun sebenarnya, meskipun keduanya merupakan kriteria pengukuran kinerja, terdapat perbedaan makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga bentuknya cenderung kualitatif. Sedangkan ukuran kinerja adalah kriteria kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya lebih bersifat kuantitatif. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi.

Mardiasmo dikutip (Biduri, 2018: 139) menjelaskan bahwa sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment systems*.

2.1.3.4 Indikator Kinerja Instansi Pemerintah

Haryanto, dkk. (2017: 18) menyatakan bahwa salah satu tuntutan terhadap organisasi sektor publik adalah adanya perhatian terhadap penerapan konsep *value for money* dalam aktivitas organisasi sektor publik. *Value For money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Ketiga hal tersebut di atas, merupakan elemen pokok value for money, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja belum cukup. Perlu ditambah dua elemen lain yaitu keadilan (equity) dan pemerataan atau kesetaraan (equality). Keadilan mengacu pada adanya kesempatan sosial (social opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Selain keadilan, perlu dilakukan distribusi secara merata (equality). Artinya, penggunaan uang publik hendaknya tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini adalah merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan variabel-variabel penelitian dengan pengujian hipotesis yang telah dirumuskannya. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu sehingga hasil penelitian ini dapat melaporkan teori yang baru dan wawasan kajian teoritis.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang penerapan akuntansi dan pengawasan internal apakah berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah diantaranya, variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yang mana berbeda dengan peneliti terdahulu yang menggunakan 2 atau lebih variabel.

Adapun ringkasan yang dapat dilihat pada tabel dibawah mengenai kesimpulan peneliti terdahulu, sebagai berikut :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu

No.	Penulis	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Putri wulan sari (2014)	Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal	Penerapan akuntansi(X1) Pengawasan internal	Sistem Pengendalian Intern

		terhadap kinerja instansi pemerintah.	(X2) Kinerja instansi pemerintah (Y)	berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
2.	Fitriani Saragih (2014)	Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD SE Kota Medan	Penerapan Akuntansi (X1), Kualitas Informasi Akuntansi (X2) dan Kinerja Keuangan (Y)	Good governance government has no significant influence on financial performance SKPD in Medan. The influence of good government governance to financial performance SKPD in Medan is very low
4.	Ponjaya Tri Handayani (2015)	-Pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris BPKAD Kabupaten Kubu Raya)	Penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik (X1) Pengawasan kualitas laporan keuangan (X2) Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y)	penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik, pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
5.	Rahima, Amrul 2010	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar	Penerapan Sistem Akuntansi (X1), Transparansi Publik (X2) dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan	Hasil penelitian dan uji hipotesis menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan Daerah
6.	Saputra (2014)	PENGARUH PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KINERJA INSTANSI PADA PEMERINTAH KOTA	Pengawasan internal (X1), pengawasan eksternal (X2), dan kinerja instansi (Y)	Pengawasan internal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja instansi pemerintah Kota

		PADANG (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)		Padang Pengawasan eksternal berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja insatnsi pemerintah Kota Padang
7.	Mafikhah, N. (2010)	Teknologi Informasi Pada Niat Untuk Mendorong Kwoledge Sharing Karyawan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta	Teknologi Informasi	Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Teknologi Informasi Pada Niat Untuk Mendorong Kwoledge Sharing Karyawan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta
8	Nurmala Sari, Muhsyaryah dan Sri wahyuni (2020)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Se Sumatera Utara	Sistem Pengendalian Intern (X1) , Ketersediaan Anggaran (X2) dan Efektivitas Penerapan Sistem (Y)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran berpengaruh Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Se Sumatera Utara
9	Eka Nurmala Sari, Fitriani Saragih (2009)	Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Peusahaan Pada Hotel Berbintang Di Kota Medan	Sistem Pengendalian Manajemen, Kinerja Keuangan	The management control process partially has positive effect to the starry hotel performance in Medan City posed through regression coefficient value equal 0,313. It means the higher the quality of management control process at the starry hotel the higher the company's performance

10	hafsah ramdhansyah hasan sakti siregar (2014)	analisis sistem intern daerah	kelemahan pengendalian pemerintah	Intern Pemerintah	Hasil analisis data mendapati bahwa masih terdapat berbagai kelemahan dalam penerapan sistem pengendalian intern pemerintah daerah. Kelemahan tersebut antara lain kelemahan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM), atau tepatnya sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.
----	---	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------	---

2.2 Kerangka Konseptual

Berdasarkan dari teori diatas yang hasilnya semua berpengaruh dan didukung oleh peneliti terdahulu, maka disimpulkan kerangka berfikir konseptual sebagai berikut

1. Pengaruh penerapan standart akuntansi sektor publik (X₁) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Akuntansi sektor publik memiliki peranan yang vital dan menjadi subyek untuk didiskusikan baik oleh praktisi sektor publik maupun kalangan akademisi. Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik

manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto, dkk., 2017:1), hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahima, Amrul 2010 menunjukkan bahwa penerapan standart akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Pengaruh pengawasan internal (X_2) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61). Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurmala Sari, Fitriani Saragih (2009) menunjukkan bahwa Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja instansi.

3. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal (X) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik.

2. Terdapat pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Siantar Timur.
3. Terdapat pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah pada Kecamatan Siantar Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif kausal dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif kausal merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat dan apabila ada seberapa eratnya pengaruh atau hubungan serta berarti atau tidaknya pengaruh atau hubungan itu (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menjelaskan hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi dari variabel-variabel yang akan diteliti. Pendekatan kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan akuntansi sektor publik, pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintahan. Untuk memperoleh gambaran mengenai pengaruh antara kedua variabel tersebut maka penulis menggunakan metode asosiatif kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab dan akibat, jadi disini terdapat variabel yang mempengaruhi (*variabel dependen*) dan variabel yang dipengaruhi (*variabel independen*) (Sugiyono, 2016).

3.2 Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini ada dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen. Diuraikan definisi dari kedua variabel yang digunakan dalam penelitian.

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab, karena adanya variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel yang mempengaruhi. Berikut ini yang menjadi variabel dependen dan independen dalam penelitian ini :

3.2.1 Penerapan Akuntansi sektor publik (X₁)

Suatu tindakan yang dilakukan untuk memastikan stndaryang telah ditetapkan telah terealisasi dengan baik dan memastikan semua pihak telah berkerja sesuai standar yang berlaku Menurut Bastian (2014:) siklus akuntansi keuangan sektor publik bisa diukur dengan

1. Transaksi, persetujuan jual beli
2. Analisis bukti transaksi,
3. Pencatatan data transaksi,
4. Pengikhtisaran, dalam buku besar terdapat daftar nama kelompok akun yang ada pada suatu organisasi.
5. Pelaporan, selama satu periode akuntansi

3.2.2 Pengawasan internal (X₂)

Pengawasan internal adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintah telah digunakan selektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan menurut

Swayer's (2005: 49) menyebutkan beberapa indikator yang dapat digunakan manager untuk mengontrol fungsi di dalam perusahaan adalah

1. Organisasi (organization)
2. Kebijakan (policy)
3. Prosedur (procedure)
4. Personalia (personnel)
5. Akuntansi (accounting)
6. Penganggaran (budgeting)
7. Pelaporan, kebanyakan organisasi

3.2.3. Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Peraturan presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tabel III.1
Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Variabel Independen Penerapan akuntansi sektor publik (X1)	Mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek- proyek kerjasama sektor publik dan swasta (Bastian, 2014)	1) Analisis bukti transaksi. 2) Pencatatan data transaksi. 3) Pengikhtisaran. 4) Pelaporan	Ordinal
2.	Variabel Independen Pengawasan Internal (X2)	Pengawasan berisi rencana organisasi dan semua metode yang terkoordinasi dan pengukuran-	1. Organisasi. 2. Kebijakan 3. Prosedur 4. Penganggaran	

		pengukuran yang diterapkan di perusahaan untuk mengamankan aktiva, memeriksa akurasi dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi oprasiaonal, dan mendorong ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang telah ditetapkan (Swayer"s, 2005).		Ordinal
3.	Variabel dependen Kinerja Instansi pemerintah (Y)	Peraturan presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualitas (mutu) 2. Kuantitats (jumlah) 3. Ketepatan waktu 4. Efektivitas 5. Efisiensi 	Ordinal

3.3. Aspek Pengukuran Variabel

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2018).

Berikut ini akan digambarkan metode penggunaan skala likert sebagai berikut:

**Tabel III.2
Model Skala Likert**

No.	Keterangan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.3.1 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian adalah kecamatan Siantar Timur

3.3.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan untuk penelitian ini pada bulan Juli sampai Oktober 2021.

Tabel III.3 Waktu Penelitian

No	Keterangan	Juli			Agustus				September				Oktober				
		28	29	30	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul	■															
2.	Pengumpulan Data		■	■													
3.	Penyusunan Proposal				■	■											
4.	Bimbingan Proposal						■	■	■								
5.	Seminar Proposal								■								
6.	Penyempurnaan Proposal								■	■							
7.	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■				
8.	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
9.	Sidang Meja Hijau														■	■	■
10.	Wisuda																■

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

3.4.1 Populasi Penelitian

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau objek yang merupakan sifat-sifat umum. Menurut (Sugiyono, 2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kecamatan siantar timur yang tersebar di 7 kelurahan Siantar Timur yang berjumlah 60 orang.

3.4.2 Sampel Penelitian

Menurut (Arikunto, 2012) sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Selanjutnya menurut (Sugiyono, 2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Maka dari penjelasan para ahli tersebut, penulis menetapkan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Kecamatan Siantar Timur.

Tabel III.4
Kelurahan Kecamatan Siantar Timur

No.	Lokasi	Jumlah
1	Asuhan	7
2	Merdeka	8
3	Kebun Sayur	6
4	Pahlawan	7
5	Pardoman	8
6	Siopat Suhu	7
7	Tomuan	7
8	Pengawas Internal	10
Jumlah		60

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu :

Penelitian Lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada instansi yang menjadi objek penelitian.

Untuk mendapatkan data primer yaitu dengan cara :

1. Kuesioner, teknik kuesioner yang penulis gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada pegawai (*responden*) di seluruh organisasi pemerintahan. Responden diminta untuk melengkapi kuesioner dengan model *skala likert* untuk menunjukkan persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan dengan skor sebagai berikut :

3.5.1 Uji Instrumen Penelitian

Sebelum digunakan pada penelitian yang sesungguhnya, angket atau kuesioner harus diuji terlebih dahulu. Uji instrumen dilakukan untuk mengetahui validitas (keabsahan) dan reabilitas (kehandalan) suatu instrumen. Dari uji coba tersebut dapat diketahui kelayakan dari instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dari responden.

3.5.2 Uji Kualitas Data

Untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah uji statistic deskriptif dan uji regresi linier berganda

3.5.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, minimum, dan maksimum (Ghozali, 2016). Persebaran data diukur menggunakan standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Semakin kecil deviasi standar menunjukkan bahwa data tersebut mengelompok di sekitar rata-rata hitung

sehingga persebaran datanya pun semakin kecil. Standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum menggambarkan dispersi (persebaran) variabel yang bersifat metrik, sedangkan non-metrik digambarkan dengan distribusi frekuensi variabel.

3.5.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda (multiple regression) dilakukan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen (explanatory) terhadap satu variabel dependen (Ghozali, 2016). Model regresi berganda dalam pernyataan ini dinyatakan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = kinerja instansi pemerintah

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi dari X_1 (kompetensi sumber daya manusia)

X_1 = variabel kompetensi sumber daya manusia

β_2 = koefisien regresi dari X_2 (pemanfaatan teknologi informasi)

β_1 = koefisien regresi dari X_1 (kompetensi sumber daya manusia)

X_1 = variabel kompetensi sumber daya manusia

β_2 = koefisien regresi dari X_2 (pemanfaatan teknologi informasi)

X_2 = variabel pemanfaatan teknologi informasi

β_3 = koefisien regresi dari X_3 (sistem pengendalian intern)

X_3 = variabel sistem pengendalian intern

e = standar error

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu (Juliandi et al., 2015). Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2018). Teknik analisis data ini menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis sebagai berikut:

3.6.1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur. Maka dalam penelitian ini digunakan uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang digunakan benar-benar layak atau tidak. Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu:

3.6.1.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian kenormalan data. Menurut Imam Ghazali (2016), uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorov-Smirnov.

Menurut Sugiyono (2016) data dikatakan normal, apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada ($P > 0,05$). Sebaliknya, apabila nilai signifikan lebih kecil

dari 0,05 pada ($P < 0,05$), maka data dikatakan tidak normal. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari Kolmogorov-Smirnov Z statistik. Jika profitabilitas Z statistik lebih kecil dari 0,05 maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi secara normal.

3.6.1.2 Uji Multikolinieritas

Digunakan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel independen. Apabila terdapat korelasi antara variabel bebas, maka terjadi multikolinearitas, demikian juga sebaliknya. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat VIF (Variance Inflation Factor) antara variabel independen dan nilai tolerance. Batasan yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF 10 (Juliandi et al., 2015).

3.6.1.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homokedastisitas sebaliknya jika varian berbeda maka disebut heterokedastisitas. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (poin-poin) menyebar di bawah dan di atas angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas (Juliandi et al., 2015). Pada penelitian ini juga menggunakan uji glejser .

3.6.2 Uji Validitas

Uji validitas berarti menguji sejauh mana ketepatan atau kebenaran suatu instrumen sebagai alat ukur variabel penelitian. Jika instrumen valid/benar maka hasil pengukuran pun kemungkinan akan benar (Juliandi et al., 2015)

Dengan menggunakan *product moment* rumusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$r = \frac{n \sum xy - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{[n \sum x^2 - (\sum x)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r : Koefisien korelasi

n : Sampel

$\sum x$: Jumlah pengamatan variabel (x)

$\sum y$: Jumlah pengamatan variabel (y)

$(\sum x^2)$: Jumlah kuadrat pengamatan variabel (x)

$(\sum y^2)$: Jumlah kuadrat pengamatan variabel (y)

x : Variabel bebas (Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Motivasi)

y : Variabel terikat (Kinerja)

Hipotesisnya adalah :

1. $H_0: p = \{ \text{tidak ada korelasi signifikan skor item dengan total skor (tidak valid)} \}$
2. $H_1: p > 0 \{ \text{ada korelasi signifikan skor item dengan total skor valid} \}$ kriteria penerimaan atau penolakan hipotesisnya adalah sebagai berikut:

- a. Tolak Hipotesis jika nilai korelasi adalah negatif dan atau probabilitas yang dihitung nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0.05 (sig 2 tailed 0,05)
- b. Terima Hipotesis jika nilai korelasi adalah positif dan probabilitas yang dihitung nilai probabilitas yang ditetapkan sebesar 0.05 (sig 2-tailed 0.05).

Nilai korelasi (r) dapat dilihat dari tabel *correlation* kolom skor total baris *pearson correlation*. Menurut Sugiyono, (2016, hal 122), menyatakan bila korelasi tiap factor positif dan besarnya 0,5 ke atas maka faktor tersebut memiliki validitas konstruksi yang baik. Untuk menguji koefisien korelasi ini digunakan *level of significant* = 5% dengan interpretasi data adalah jika nilai r hitung $>$ r tabel berarti valid.

Tabel III.5
Hasil Validitas penerapan akuntansi sektor publik

No. Butir	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,525	0,250	Valid
2	0,547	0,250	Valid
3	0,647	0,250	Valid
4	0,773	0,250	Valid
5	0,651	0,250	Valid
6	0,603	0,250	Valid
7	0,492	0,250	Valid

Dari tabel diatas terlihat nilai uji validitas untuk variabel penerapan akuntansi sektor publik , dimana semua instrument bernilai lebih tinggi dari 0,250 ini artinya semua instrument yang digunakan untuk penelitian valid dan layak untuk di lanjutkan penelitiannya.

Tabel III.6
Hasil Validitas Pengawasan internal

No. Butir	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,479	0,250	Valid
2	0,593	0,250	Valid
3	0,472	0,250	Valid
4	0,586	0,250	Valid
5	0,505	0,250	Valid
6	0,426	0,250	Valid
7	0,639	0,250	Valid
8	0,594	0,250	Valid
9	0,521	0,250	Valid

Dari tabel diatas terlihat nilai uji validitas untuk variabel pengawasan internal , dimana semua instrument bernilai lebih tinggi dari 0,250 ini artinya semua instrument yang digunakan untuk penelitian valid dan layak untuk di lanjutkan penelitiannya.

Tabel III.7
Hasil Validitas kinerja instansi

No. Butir	r-hitung	r-tabel	Status
1	0,680	0,250	Valid
2	0,647	0,250	Valid
3	0,546	0,250	Valid
4	0,763	0,250	Valid
5	0,603	0,250	Valid
6	0,659	0,250	Valid
7	0,498	0,250	Valid
8	0,675	0,250	Valid
9	0,680	0,250	Valid
10	0,397	0,250	Valid
11	0,680	0,250	0,680

Dari tabel diatas terlihat nilai uji validitas untuk variabel kinerja instansi , dimana semua instrument bernilai lebih tinggi dari 0,250 ini artinya semua instrument yang digunakan untuk penelitian valid dan layak untuk di lanjutkan penelitiannya.

4. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas berarti untuk melihat apakah instrumen penelitian merupakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya. Jika variabel penelitian menggunakan instrumen yang handal dan dapat dipercaya maka hasil penelitian juga dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi (Juliandi et al., 2015).

Penguji reliabilitas dilakukan menggunakan (*Cronbach Alpha*), dikatakan reliabel hasil alpha 0.6 dengan rumus alpha sebagai berikut (Juliandi et al., 2015).

$$\alpha = \frac{\sum s_i^2}{k - 1} \frac{\sum 6_i^2}{6_1}$$

Dimana :

= Reliabilitas instrumen

k = Banyaknya butir pernyataan

\sum = Jumlah varians butir

= Varians total

Kriteria penguji reliabilitas adalah nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach Alpha*) 0.6 maka kesimpulannya instrumen yang diuji tersebut adalah real (terpercaya) (Juliandi et al., 2015).

Tabel III.8
Uji Realibilitas Instrument

Instrument	Nilai realibilitas	Status
Penerapan akuntansi sektor publik	0,605	Reliable
Pengawasan internal	0,621	Reliable
Kinerja instansi	0,619	Reliable

Bedasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien dengan intrepertasi realibilitas lebih tinggi dari 0,6 dengan demikian seluruh instrument variable

penelitian ini adalah adalah reliable atau layak, sehingga data yang digunakan untuk analisis berikutnya juga layak, karena reliable (bisa dipercaya).

3.7. Uji Hipotesis

Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini uji yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji T (Uji Parsial)

Pada regresi yang mempunyai lebih satu variabel independen, jika asumsi 1-5 terpenuhi maka mempunyai estimator yang Blue. Bila asumsi 6 juga terpenuhi yaitu variabel mempunyai distribusi normal maka variabel dependen Y juga akan terdistribusi secara normal (Basuki & Prawoto, 2016).

Hipotesis yang hendak diuji adalah:

1. $H_0: =$, yang berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. $H_0: ,$ berarti ada pengaruh signifikan antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Kriteria pengujian :

1. Jika t hitung $>$ t tabel berarti H_0 ditolak (bahwa variabel bebas berpengaruh terhadap kinerja).
2. Jika t hitung $<$ t tabel berarti H_0 diterima (bahwa variabel bebas tidak berpengaruh terhadap kinerja).

3.7.2 Uji F (Uji Simultan)

Perlu mengevaluasi pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen dengan uji F. Uji F ini dijelaskan dengan menggunakan analisis varian (*analysis of variance* = ANNOVA) (Basuki & Prawoto, 2016).

1. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka Hipotesis ditolak
2. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka Hipotesis diterima

3.7.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen. Nilai koefisien determinasi berada diantara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa varians variabel berikut dipengaruhi oleh varians variabel bebas, atau dengan kata lain seberapa besar variabel bebas dipengaruhi variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, Pematangsiantar merupakan daerah kerajaan. Pematangsiantar berkedudukan di Pulau holing dan Raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga Damanik yaitu Tuan sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai Raja tahun 1906. Disekitar pulau holoing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya kampung suhi haluan, siantar bayu, suhi kahaean, pantoan, suhi bah bosar, dan tomuan. Daerah-daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum kota pematangsiantar, yaitu:

1. Pulau Holing menjadi Kampung Pematang
2. Siantar Bayu menjadi Kampung Pusat Kota
3. Suhi Kahean menjadi Kampung Sipinggol-pinggol, kampung melayu, Martoba, Sukadame, dan Bane
4. Suhi Bah Bosar menjadi Kampung Kristen, Karo, Tomuan, Pantoan, Toba dan Martimbang.

Setelah belanda memasuki daerah Sumatera Utara, daerah Simalungun menjadi daerah kekuasaan belanda sehingga pada tahun 1907 berakhirilah kekuasaan Raja-raja. Sejak itu Pematangsiantar berkembang menjadi daerah yang banyak dikunjungi pendatang baru, bangsa china mendiami kawasan timbang galung dan kampung melayu. Pada tahun 1910 didirikan Badan Persiapan Kota Pematangsiantar. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1917 berdasarkan Stad Blad No.

285 Pematangsiantar berubah menjadi Gemente yang mempunyai otonomi sendiri. Sejak Januari 1939 berdasarkan Stad Blad No. 717 berubah menjadi Gemente yang mempunyai Dewan..

Berdasarkan undang-undang No.27/ 1948 status Gemente menjadi Kota Kabupaten Simalungun dan Walikota dirangkap oleh bupati simalungun sampai tahun 1957 berdasarkan uu No1/1957. Berdasarkan UU No.1/1957 berubah menjadi Kota Praja penuh dan dengan keluarnya UU No.18/1965 berubah menjadi Kotamadya , dan dengan keluarnya UU No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah berubah menjadi daerah tingkat II pematang siantar sampai sekarang. Kemudian pada tanggal 10 Maret 1986 Kota Daerah Tingkat II Pematang Siantar diperluas dari 4 (empat) kecamatan menjadi 6 (enam) kecamatan , dimana 9 desa dari wilayah kabupaten Simalungun menjadi Wilayah Kota Pematang Siantar. Sehingga luas kota pematang siantar bertambah dari 12,48km² menjadi 70,230 km². Berdasarkan Peraturan pemerintah No.15 tahun 1986 tanggal 10 Maret 1986 kota daerah tingkt II Pematang Siantar iperluas menjadi 6 (enam) wilayah kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Siantar Barat
2. Kecamatan Siantar Utara
3. Kecamatan Siantar Timur
4. Kecamatan Siantar Selatan
5. Kecamatan Siantar Marihat .
6. Kecamatan Siantar Martoba

Kemudian pada tahun 2007, diterbitkan peraturan daerah tentang pemekaran wilayah admisnistrasi Kota Pematangsiantar yaitu:

1. Peraturan Daerah No.3 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Sitalasari
2. Peraturan Daerah No.6 tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Siantar Marimbun

Sehingga secara administrasi wilayah Kota Pematangsiantar terbagi menjadi

8 (Delapan) kecamatan yaitu:

1. Kecamatan Siantar Marihat
2. Kecamatan Siantar Marimbun
3. Kecamatan Siantar Selatan
4. Kecamatan Siantar Barat
5. Kecamatan Siantar Utara
6. Kecamatan Siantar Timur
7. Kecamatan Siantar Martoba
8. Kecamatan Siantar Sitalasari

Siantar timur memiliki luas sebesar 4.52 km² dengan jumlah penduduknya adalah 44,091 jiwa (2.000) jiwa, Sedangkan Siantar Timur memiliki 7 Kelurahan.

Yakni

1. Asuhan
2. Merdeka
3. Kebun Sayur
4. Pahlawan
5. Pardomuan
6. Siopat Suhu
7. Tomuan

4.1.2 Identitas Responden

Dalam penelitian jumlah responden yang menjadi sampel penelitian adalah 60 orang, identitas diri yang ditanyakan adalah Jenis kelamin, Usia, Pendidikan dan Lama kerja.

a. Jenis Kelamin

Tabel IV.1 Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki laki	26	43.3	43.3	43.3
perempuan	34	56.7	56.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Dari tabel diatas terlihat persentase jenis kelamin responden, dimana terlihat responden yang berjenis kelamin laki laki berjumlah 26 orang (43,3%) dan yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 34 orang (56,7%).

b. Usia Responden

Tabel IV.2 Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 25-45 tahun	42	70.0	70.0	70.0
46-65 tahun	18	30.0	30.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Dari tabel diatas terlihat persentase usia responden, dimana yang berusia 25-45 tahun berjumlah 42 orang (70%), dan yang berusia 46-65 tahun berjumlah 18 orang (30%).

c. Pendidikan Responden

Tabel IV.3 Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Strata	37	61.7	61.7	61.7
SMA./SMK	23	38.3	38.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Dari tabel diatas terlihat persentase jawaban untuk pendidikan responden sebanyak 37 orang (61,7%) berpendidikan Strata dan 23 orang (38,3%), berpendidikan SMA/SMK.

d. Lama Kerja

Tabel IV.4 Lama Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-15 tahun	37	61.7	61.7	61.7
> 15 tahun	23	38.3	38.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Dari tabel diatas terlihat persentase jawaban untuk pertanyaan lama kerja responden, responden yang sudah bekerja selama 1-15 tahun berjumlah 37 orang (61,7%) dan yang sudah bekerja selama 15 keatas berjumlah 23 orang (38,3%).

4.1.3 Analisis Persentase Jawaban Responden.

Sebelum dilakukan pengolahan data lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti melakukan pendistribusian jawaban responden, untuk melihat apakah kondisi di lapangan sesuai dengan jawaban responden, dalam penelitian ini digunakan skala likert dengan Skor 1-5 .

Tabel IV.5 Kriteria Jawaban Responden

Kriteria	Keterangan
SS	Sangat Setuju
S	Setuju
KS	Kurang Setuju
TS	Tidak Setuju
STS	Sangat Tidak Setuju

4.1.3.1. Persentase Responden Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Tabel IV.6
Persentase Responden Variabel Penerapan Akuntansi Sektor Publik

No. Item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Laporan keuangan sudah dapat mencerminkan adanya pengendalian dan penguasaan atas entitas pelaporan baik terhadap asset, ketentuan hukum dalam melaksanakan tugas guna mencapai misi tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya	19	31.7%	28	46.7%	10	16.7%	2	3.3%	1	1.7%
2. Laporan keuangan merupakan media pertanggungjawaban yang disusun atas dasar asumsi tertentu, yaitu kemandirian, entitas, adanya kesinambungan entitas	14	23.3%	23	38.3%	20	33.3%	3	5.0%	-	-
3. Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan	9	15.0%	27	45.0%	16	26.7%	7	11.7%	1	1.7%
4. Pelaporan informasi keuangan dapat dipahami dengan Informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan menggunakan prinsip-prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan	18	30.0%	37	61.7%	5	8.3%	-	-	-	-

5. Setiap laporan keuangan tetap memiliki kendala informasi baik relevansinya maupun keandalannya	16	26.7%	42	70.0%	2	3.3%	-	-	-	-
6. Untuk mengatasi setiap kendala informasi yang terjadi maka ada pembatasan terhadap laporan yang dinilai terkait dengan unsur-unsur laporan keuangan, yaitu terbatas pada laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, serta catatan catatannya dan laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas dengan didasari pada pengakuan terhadap unsur-unsur laporan keuangan	16	26.7%	40	66.7%	4	6.7%	-	-	-	-
7. Informasi yang dihasilkan laporan keuangan dapat menunjukkan informasi tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibutuhkan, karena dengan informasi ini pemerintah mempunyai bahan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih baik	16	26.7%	39	65.0%	4	6.7%	1	1.7	-	-

Penerapan akuntansi sektor publik sudah berjalan dengan baik di kantor Kecamatan Siantar timur, terlihat dari jawaban responden yang mayoritasnya adalah setuju artinya Penerapan akuntansi sektor publik sudah mengalami peningkatan di kantor Kecamatan Siantar Timur, adapun hal yang tidak disetujui dan mengalami penurunan menurut responden adalah mengenai informasi dalam laporan keuangan mempunyai karakteristik belum relevan, handal dan dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan.

4.1.3.2. Persentase Responden Jawaban Variabel Pengawasan Internal

Tabel IV.7 Persentase Jawaban Variabel Pengawasan Internal

No. Item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Satuan pengawasan internal selalu membuat laporan pemeriksaan sesuai dengan temuan-temuan pemeriksaan	15	25.0%	34	56.7%	9	15.0%	2	3.3%	-	-
2. Tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan pengawasan internal ditetapkan secara tertulis	16	26.7%	20	33.3%	20	33.3%	2	3.3%	2	3.3%
3. Satuan pengawasan internal ikut serta dalam penyusunan prosedur-prosedur pemerintahan	6	10.0%	26	43.3%	21	35.0%	2	3.3%	5	8.3%
4. Satuan pengawasan internal selalu menilai objek yang diperiksa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya	11	18.3%	27	45.0%	15	25.0%	3	5.0%	4	6.7%
5. Pengawasan yang dilakukan meliputi seluruh tahap pemeriksaan	17	28.3%	32	53.3%	7	11.7%	2	3.3%	2	3.3%
6. Ketika dilakukan diskusi oleh staf satuan pengawasan internal, pimpinan objek yang diperiksa selalu menerima pendapat (temuan pemeriksaan) yang baik	18	30.0%	32	53.3%	7	11.7%	3	5.0%	-	-
7. Objek yang diperiksa selalu melaksanakan saran dan rekomendasi satuan pengawasan internal dengan baik	19	31.7%	28	46.7%	10	16.7%	2	3.3%	1	1.7%
8. Staf satuan pengawasan internal selalu menegur dan melaporkannya kepada manajemen apabila saran dan rekomendasi tidak segera dilaksanakan	14	23.3%	23	38.3%	20	33.3%	3	5.0%	-	-
9. Terjadi peningkatan dalam efektivitas pengendalian internal biaya operasi setelah saran dan rekomendasi dilaksanakan oleh objek yang diperiksa	9	15.0%	27	45.0%	16	26.7%	7	11.7%	1	1.7%

Pengawasan internal yang dilakukan di Kecamatan Siantar Timur sudah berjalan dengan cukup baik terlihat dari jawaban responden yang mayoritas

responden yang jawabannya adalah setuju, namun beberapa hal yang kurang disetujui responden adalah tentang Tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan pengawasan internal ditetapkan secara tertulis, Satuan pengawasan internal ikut belum mau serta dalam penyusunan prosedur-prosedur pemerintahan, Satuan pengawasan internal tidak selalu menilai objek yang diperiksa sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, Pengawasan yang dilakukan meliputi seluruh tidak tahap pemeriksaan dan Objek yang diperiksa tidak selalu melaksanakan saran dan rekomendasi satuan pengawasan internal dengan baik.

4.1.3.3. Persentase Responden Variabel Pengawasan Internal

Tabel IV.8 Persentase Jawaban Variabel Pengawasan Internal

No. Item	SS		S		KS		TS		STS	
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan	16	26.7%	39	65.0%	4	6.7%	1	1.7%	-	-
2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin	18	30.0%	32	53.3%	10	16.7%	-	-	-	-
3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi	20	33.3%	32	53.3%	8	13.3%	-	-	-	-
4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program	18	30.0%	37	61.7%	5	8.3%	-	-	-	-
5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan	16	26.7%	42	70.0%	2	3.3%	-	-	-	-
6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan	16	26.7%	40	66.7%	4	6.7%	-	-	-	-
7. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program	13	21.7%	33	55.0%	14	23.3%	-	-	-	-
8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program	24	40.0%	31	51.7%	5	8.3%	-	-	-	-
9. Kegiatan/program yang disusun telah mengkoordinir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat	16	26.7%	39	65.0%	4	6.7%	1	1.7%	-	-
10. LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam	14	23.3%	34	56.7%	9	15.0%	3	5.0%	-	-

merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan										
11. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan	16	26.7%	39	65.0%	4	6.7%	1	1.7%	-	-

Pengawasan Internal yang ada di kecamatan Siantar Timur menurut responden penelitian sudah berjalan cukup baik, terlihat dari jawaban responden yang mayoritas jawabannya adalah setuju, artinya sudah terjadi peningkatan pada pengawasan internal di Kecamatan Siantar Timur, namun berdasarkan hasil angket yang sudah disebarakan masih terdapat beberapa responden yang berpendapat bahwa LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya belum diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan dan Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah belum bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan

4.2. Analisis Data

4.2.1. Analisis Linier berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk memprediksi perubahan nilai variabel terikat akibat perubahan dari nilai variabel bebas. Dimana rumus pengujiannya adalah.

Tabel IV.9
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.568	5.617		8.290	.000
PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	.319	.176	.089	3.676	.002
PENGAWASAN INTERNAL	.395	.320	.080	3.610	.003

a. Dependent Variable: KINERJA INSTANSI

$$Y = 16,568 + 0.319 X_1 + 0.395 X_2 + e$$

Model persamaan diatas bermakna :

a. nilai konstanta sebesar = 16,568 menunjukkan variabel independen yaitu penerapan akutansi sektor publik dan pengawasan internal dalam keadaan konstan tidak mengalami perubahan (sama dengan 0) maka akan menaikkan kinerja instansi vans senilai 18,956%

b. nilai koefisien regresi X1 adalah sebesar 0,319 menunjukkan bahwa jika penerapan akutansi sektor publik mengalami peningkatan maka akan menaikkan keputusan memberli senilai 3,19%.

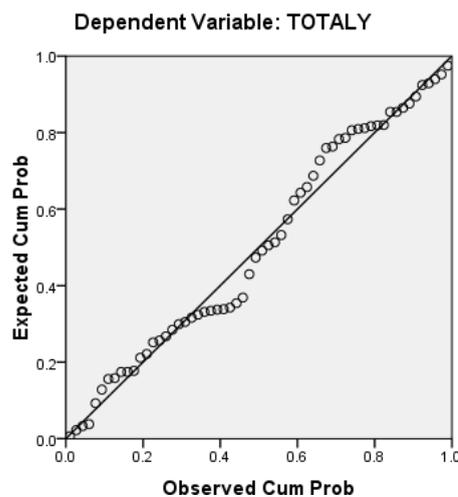
c. nilai koefisien regresi X2 adalah sebesar 0.395 menunjukkan bahwa jika pengawasan internal mengalami kenaikan 1 % maka akan menaikkan kinerja instansi sebesar 3,95 %

4.2.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini alat yang digunakan untuk melakukan uji normalitas, yaitu dengan menggunakan tabel Grafik Normal Probability Plot (P-Plot). Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar IV.1 Normalitas

Gambar IV.1 mengindikasikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, sehingga data dalam model regresi penelitian ini cenderung normal dikarenakan berdasarkan gambar diatas distribusinya mengikuti garis diagonal.

2. Uji Multikolinieritas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan kolerasi yang kuat antar variable independen ketentuan pengujiannya bisa dilihat dari tabel dibawah ini

Tabel IV.10
Coefficients^a

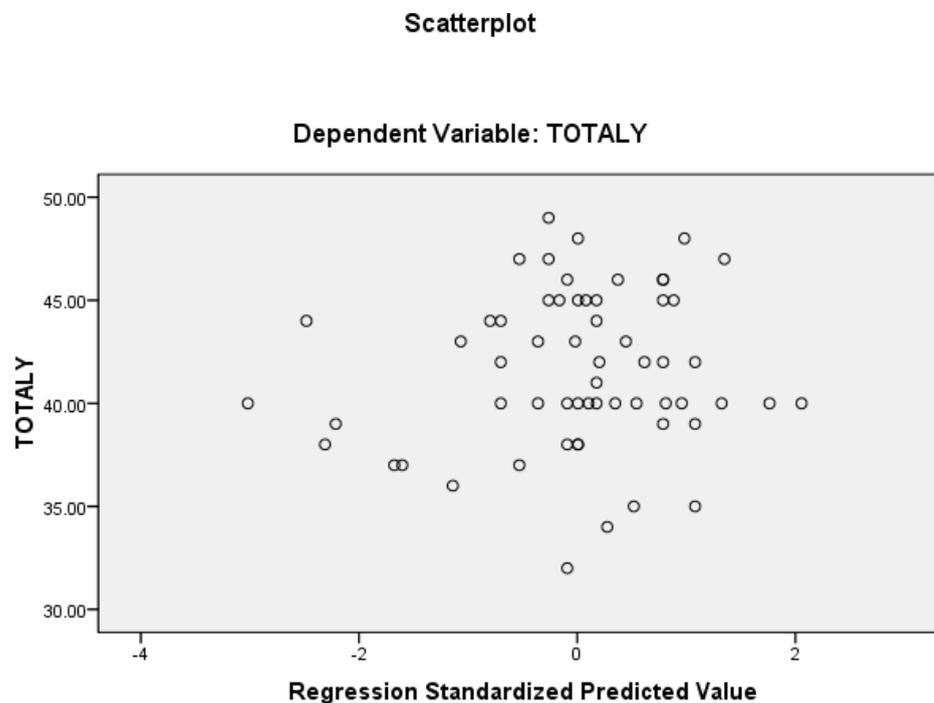
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.568	5.617			
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.319	.176	.089	.997	1.003
Pengawasan Internal	.395	.320	.080	.997	1.003

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi

Dari tabel diatas bisa Kedua variable independent yakni X_1 dan X_2 memiliki nilai VIF dalam batas tolenransi yang telah ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5), sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam varaibel independent penelitian ini karena Cara yang digunakan untuk menilainya adalah dengan meilhat nilai factor inflasi varian (*Variance inflasi Factor / VIF*) yang tidak melebihi 4 atau 5.

3. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas digunakan unbtuk menguji apakah dalam model regressi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika varians residual dari suatu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas, dan jika varians berbeda disebut heterokedastitas. Model yang baik adalah tidak terjadi heterodekdasitas.



Gambar IV.2 Uji Heterokedastisitas

Gambar diatas telah menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang jelas teratur, serta tersebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. dengan demikian “tidak terjadi heterokedastisitas “ pada tabel regressi.

4.3. Uji Hipotesis

4.3.1. Uji Secara Parsial (Uji t)

Uji secara parsial atau uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, secara parsial (sendiri-sendiri) kriteria dari pengujian parsial bisa dilihat dibawah ini.

Tabel IV.11
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.568	5.617		8.290	.000
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.319	.176	.089	3.676	.002
Pengawasan Internal	.395	.320	.080	3.610	.003

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi

1. Pengujian Penerapan akuntansi sektor publik dengan Kinerja instansi

Dari tabel IV.15 diatas bisa dilihat bahwa nilai t adalah 3,676, kemudian nilai sig nya adalah 0,002

Ho: = artinya penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

Ho : $\neq 0$, artinya penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

Pengujian Hipotesisnya adalah :

- 1) Jika hitung t tabel maka Ho diterima, artinya penerapan akuntansi sektor publik tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.
- 2) Jika hitung t_{tabel} maka Ho ditolak, artinya penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

Bedasarkan tabel IV.15 diatas diperoleh t hitung untuk variable kualitas pelayanan sebesar 3,676 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (60-2=58),

di peroleh t tabel 2,00. Jika t hitung $>$ t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 dan Y, didalam hal ini t-hitung = 3,676 $>$ t-tabel =2,00, Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig adalah 0,002 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,002 $<$ 0,05, sehingga H_0 di tolak. penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

2. Pengujian Penerapan akuntansi sektor publik dengan Kinerja instansi

Dari tabel IV.15 diatas bisa dilihat bahwa nilai t adalah 3,610, kemudian nilai sig nya adalah 0,003

H_0 : = artinya pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

H_0 : $\neq 0$, artinya pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

Pengujian Hipotesisnya adalah :

- 1) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.
- 2) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

Bedasarkan tabel IV.15 diatas diperoleh t hitung untuk variable kualitas pelayanan sebesar 3,610 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan dk = n-2 (60-2=58), di peroleh t tabel 2,00. Jika t hitung $>$ t tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X2 dan Y, demikian juga sebaliknya jika t hitung $<$ t tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X2 dan Y, didalam hal ini t-hitung

= 3,610 > t-tabel =2,00, Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig adalah 0,003 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,003 < 0,05, sehingga H_0 di tolak. Artinya pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

4.3.2. Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji simultan dimaksudkan untuk mencari tahu hubungan antara variabel bebas dan terikat dengan cara menguji semua variabel bebas (bersama) dengan variabel terikat. Pengujian penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi sepatu vans, bisa dilihat dibawah ini

Tabel IV.12
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.653	2	5.827	14.394	.000 ^a
	Residual	142.747	57	14.785		
	Total	154.400	59			

Dari tabel IV.16 diatas bisa dilihat bahwa nilai f adalah 14,394 kemudian nilai sig nya adalah 0,000

H_0 : = artinya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansian Kecamatan Siantar Timur.

H_0 : $\neq 0$, artinya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansian Kecamatan Siantar Timur.

Kriteria pengujian hipotesisnya adalah :

- 1) Jika $f_{hitung} < f_{tabel}$ maka H_0 diterima, artinya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal tidak berpengaruh terhadap kinerja instansian sepatu vans di Universitas Muhammadiyah Sumatera Ut.
- 2) Jika $f_{hitung} > f_{tabel}$ maka H_0 ditolak, artinya penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansian sepatu vans di Universitas Muhammadiyah Sumatera Ut

Bedasarkan tabel IV.12 diatas diperoleh f hitung untuk variable bebas sebesar 14,394 untuk kesalahan 5% uji 2 pihak dan $dk = n-2$ ($60-2=58$), di peroleh f tabel 3,16. Jika f hitung $>$ f tabel maka didapat pengaruh yang signifikan antara X_1 dan X_2 terhadap Y , demikian juga sebaliknya jika f hitung $<$ f tabel maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara X_1 dan X_2 terhadap Y , didalam hal ini f -hitung = 14,394 $>$ f -tabel =3,16. Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 $<$ 0,05, sehingga H_0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

4.3.3. Uji Determinasi

Tujuan dari koefisien determinasi adalah untuk mengetahui jumlah besaran persentase yang dari variabel bebas dalam mempengaruhi variabel terikat nilai dari koefisien determinasi ini bisa dilihat pada tabel IV.13 dibawah ini.

Tabel IV.13
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.417 ^a	.414	.321	2.84513

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Internal, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

Cara melihat determinasi adalah dengan melihat kolom R-square dimana nilai R square pada tabel diatas bernilai 0,414 atau senilai 41,4% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas (penerapan akutansi sektor publik dan pengawasan internal) terhadap variabel terikat (kinerja instansi) sedangkan sisanya 49 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di teliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Dari hasil penelitian terlihat bahwa semua variabel bebas (penerapan akutansi sektor publik dan) mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (keputusan pelanggan) lebih rinci hasil analisis dan pengujian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengaruh penerapan standart akuntansi sektor publik (X₁) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Dalam penelitian ini penerapan standart akuntansi ektor publik (X₁) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) hal ini terlihat t-hitung = 3,676 > t-tabel =2,00 dan nilai sig 0,002 < 0,05, sehingga H₀ di tolak. Maka semakin meningkat penerapan standar akuntansi sektor publik maka semakin meningkat kinerja instansi pemerintah, Fokus perhatian pembahasan akuntansi sektor publik yang hendaknya mendapat porsi yang lebih besar dari kalangan praktisi maupun akademisi adalah penekanan pada upaya untuk memajukan sektor

publik yang dianggap kurang efisien dan kurang menarik agar tidak tertinggal jauh dengan sektor swasta yang dipandang lebih maju dan efisien. Namun demikian, saat ini pada kalangan praktisi khususnya pemerintahan, sudah mulai ada perhatian yang lebih besar terhadap penilaian kelayakan praktik manajemen pemerintahan yang mencakup perlunya dilakukan perbaikan sistem akuntansi manajemen, sistem akuntansi keuangan, perencanaan keuangan dan pembangunan, sistem pengawasan dan pemeriksaan, serta berbagai implikasi finansial atas kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah (Haryanto, dkk., 2017:1),

Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahima, Amrul 2010 menunjukkan bahwa penerapan standart akuntansi sektor publik berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan definisi yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.

Menurut Bastian (2014: 2) menyatakan bahwa, akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisa akuntansi di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen- departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun proyek-proyek kerja sama sektor publik dan swasta, Menurut Halim dan Muhammad (2018: 3) bahwa akuntansi sektor publik

adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Menurut Indra Bastian (2010:3) akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik antara lain meliputi badan-badan pemerintahan. Yayasan organisasi politik dan organisasi masa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Universitas dan organisasi nirlaba lainnya, Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan bagi para pemakai laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2. Pengaruh pengawasan internal (X₂) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Dalam penelitian ini pengawasan internal (X₂) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) hal ini $t\text{-hitung} = 3,610 > t\text{-tabel} = 2,00$, dan nilai $\text{sig} = 0,003 < \alpha = 0,05$, sehingga H₀ di tolak. Maka semakin meningkat pengawasan internal semakin meningkat pula kinerja instansi pemerintah.

Pengawasan internal merupakan suatu pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat atau unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan.

tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya internal kontrol (Simbolon, 2013: 61).

Pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur, dan penelitian ini sejalan dengan Penelitian yang dilakukan oleh Eka Nurmala Sari, Fitriani Saragih (2009) menunjukkan bahwa Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja instansi.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan bahwa: pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pemimpin dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Menurut Siagian dikutip (Kadarisman, 2013: 172) bahwa pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Halim dan Muhammad (2018: 370) pengawasan adalah tindakan untuk membandingkan antara yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi atau untuk menjamin pencapaian tujuan tertentu secara optimal.

Pengawasan dilakukan dalam upaya untuk meyakinkan bahwa implementasi suatu kebijakan telah sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan disini diartikan sebagai suatu kegiatan penilaian terhadap suatu objek pengawasan agar mereka melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berdaya guna dan berhasil guna.

Hakikat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, hambatan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi.

Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga pendidikan juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga pendidikan dapat tercapai. Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu “pengawasan dari dalam (Internal Control) dan pengawasan dari luar (Eksternal Control) Pengawasan dari dalam (Internal Control) berarti “ pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit Pengawasan yang terbentuk didalam organisasi itu sendiri. Aparat/Unit Pengawasan ini bertindak atas nama Pimpinan Organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan organisasi

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan bahwa pengawasan internal kegiatan dengan tujuan mengawasi kegiatan-kegiatan pemerintah mulai dari program yang dilaksanakan hingga pengelolaan keuangan daerah agar sesuai dengan prosedur yang berlaku

3. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal (X) terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Peraturan presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Prawirosentono (2008:2) kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Menurut Mulyadi (2015: 63) kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai oleh pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Sutrisno (2015: 151) prestasi kerja adalah sebagai hasil kerja yang telah dicapai seseorang dari tingkah laku kerjanya dalam melaksanakan aktivitas kerja

Berdasarkan pendapat di atas, disimpulkan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing- masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika

Dalam Penelitian ini penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal (X) berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Y) dilihat dari f -hitung = 14,394 > f -tabel = 3,16. Selanjutnya terlihat pula nilai probabilitas yakni sig adalah 0,000 sedang taraf signifikan α yang ditetapkan sebelumnya adalah 0,05, maka nilai sig 0,000 < 0,05, sehingga H_0 di tolak ini berarti ada pengaruh yang signifikan antara penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah tentunya berdampak terhadap kualitas kinerja yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan, instansi pemerintah telah melakukan perencanaan, penganggaran, merealisasikan anggaran untuk pengadaan barang dan jasa, serta melaporkan keuangan kepada publik. Laporan yang dibuat kemudian diaudit untuk mengetahui kebenarannya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan uraian di atas, diduga bahwa peranan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi. dalam R-square dimana nilai R square pada tabel diatas bernilai 0,414 atau senilai 41,4% besaran nilai persentase yang mempengaruhi variabel bebas (penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal) terhadap variabel terikat (kinerja instansi) sedangkan sisanya 49 % dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah kecamatan siantar timur kota pematangsiantar. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan standart akuntansi sektor publik berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah hal ini dikarenakan nilai t hitung yang lebih tinggi dari t tabel.
2. Pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur hal ini hal ini dikarenakan nilai t hitung yang lebih tinggi dari t tabel.
3. penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal berpengaruh terhadap kinerja instansi Kecamatan Siantar Timur terlihat dari nilai f -hitung yang lebih tinggi dari F tabel.

5.2 Saran

1. Dari kuisisioner yang sudah disebar terlihat bahwa Informasi dalam laporan keuangan yang ada di kecamatan Siantar Timur belum mempunyai karakteristik relevan, handal dapat diperbandingkan serta dipahami oleh pihak yang berkepentingan, sehingga informasi ini harus diupdate dan harus menggunakan software untuk mempermudah transparansi informasinya.

2. Dari hasil kuisioner terlihat bahwa Satuan pengawasan internal belum terlalu ikut serta dalam penyusunan prosedur-prosedur pemerintahan, tentunya hal ini akan mengurangi kinerja karena tidak adanya pengawas untuk menyusun laporan sehingga bisa terjadi laporan salah atau error
3. Kinerja Instansi kecamatan Siantar Timur sudah berjalan cukup baik adapun yang perlu ditingkatkan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya harus diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan sehingga perencanaan bisa berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Pratomo Andi Widodo, M. p. (2018). *Nizamia Learning Center 2018*. 172. www.nizamiacenter.com
- Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (2018). *Lex Crimen*, 6(10), 1–11.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali, (1997). "Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan", Edisi Empat, BPFE , Yogyakarta
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik*. Edisi 3. Jakarta : Salemba Empat
- Eka Nurmala Sari, Fitriani Saragih 2009, Pengaruh Sistem Pengendalian manajemen Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Hotel Berbintang Di Kota Medan, *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*
- Fitriani Saragih, SE, M.Si, 2014, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Informasi Akuntansi Terhadap Good Government Governance Serta Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pada SKPD SE Kota Medan*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hafsah, Ramdhansyah, Hasan Sakti Siregar, 2014, Analisis Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah, *Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*
- Haryanto, SE, M.Si, Ak, Drs. Sahrudin, M.Si, Ak. & Drs. Arifuddin, M.Si, Ak., 2017, *Akuntansi Sektor Publik*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Haska, intan wina permata. (2012). *Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Dispenda Prov , Dispenda Kota , Dan Dishub Prov)*. x, 1–15.
- Jatmiko, B. (2020). Pengaruh Pengawasan Internal, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman (Survei Pada Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(2), 231. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i2.7446>
- M. Wivandi Saputra, 2014, Pengaruh Pengawasan Internal Dan Eksternal Terhadap Kinerja Instansi Pada Pemerintah Kota Padang, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

- Mardiasmo. (2004). Akuntansi Sektor Publik. *Yogyakarta: Andi*, 1–52.
- Mifti, S., Lestarito, N. B., & Kowanda, A. (2009). Pengawasan Internal dan Kinerja (Suatu Kajian di Kantor Inspektorat Jendral Departemen Dalam Negeri). *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14(3), 114–124.
- Mafikhah, N. (2010) „*eknologi Informasi Pada Niat Untuk Mendorong Knowledge Sharing Karyawan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surakarta (Sebuah Pengujian Terhadap Teori Difusi Inovasi)*“, Teknologi Informasi,
- Pamungkas, B. (2012). *Jurnal Ilmiah Ranggagading Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. *Jurnal Ilmiah Ranggagading*, 12(1), 11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Ponjaya Tri Handayani, 2015, *pengaruh penerapan standar pelaporan akuntansi sektor publik dan pengawasan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi empiris bpkad kabupaten kubu raya tahun 2015)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura
- Putri wulan sari (2014),*Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*,
- Ramadayanti, Saragih, 2021, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Dan Pengendalianintern Pemerintah Terhadap Kinerja Instansipemerintahan (Studi Pada Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun)*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
- Raharja, G. P., Herawati, N. T., & Purnamawati, I. G. A. (2015). Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Organisasi. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Rahima Br. Purba, Azima Mendina Amrul, 2010, *Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* Vol . 18, No. 2, 2018, hal 140 - 152
- Sakip, P., Penerapan, T., & Governance, G. (2012). Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 7(1), 66–79.

Sari, P. W. (2008). *Dan Pengawasan Internal*. 1–13.

Sartika, 2019, *Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

(“Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,” 2018)

9. Terjadi peningkatan dalam efektivitas pengendalian internal biaya operasi setelah saran dan rekomendasi dilaksanakan oleh objek yang diperiksa																				
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Variabel Pengawasan Internal

No. Item	SS		S		KS		TS		STS											
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%										
1. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan																				
2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dsn pemimpin																				
3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi																				
4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program																				
5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan																				
6. Membuat laporan kepada atasan setiap kegiatan atau program yang telah dilaksanakan																				
7. Melakukan pengecekan terhadap jalan nya program																				
8. Pelaksanaan kegiatan telah dikontrol dengan ukuran atau indikator kinerja yang jelas untuk menilai tingkat keberhasilan suatu program																				
9. Kegiatan/program yang disusun telah mengkoordinir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat																				
10. LAKIP sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan																				
11. Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan																				

Tabel IV.1 Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid laki laki	26	43.3	43.3	43.3
perempuan	34	56.7	56.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Tabel IV.2 Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 25-45 tahun	42	70.0	70.0	70.0
46-65 tahun	18	30.0	30.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Tabel IV.3 Pendidikan Responden

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid Strata	37	61.7	61.7	61.7
SMA./SMK	23	38.3	38.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Tabel IV.4 Lama Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1-15 tahun	37	61.7	61.7	61.7
> 15 tahun	23	38.3	38.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X11

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid STS	1	1.7	1.7	1.7
TS	2	3.3	3.3	5.0
KS	10	16.7	16.7	21.7
S	28	46.7	46.7	68.3
SS	19	31.7	31.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	3	5.0	5.0	5.0
KS	20	33.3	33.3	38.3
S	23	38.3	38.3	76.7
SS	14	23.3	23.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	STS	1	1.7	1.7	1.7
	TS	7	11.7	11.7	13.3
	KS	16	26.7	26.7	40.0
	S	27	45.0	45.0	85.0
	SS	9	15.0	15.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

X14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	5	8.3	8.3	8.3
	S	37	61.7	61.7	70.0
	SS	18	30.0	30.0	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

X15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	2	3.3	3.3	3.3
	S	42	70.0	70.0	73.3
	SS	16	26.7	26.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

X16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KS	4	6.7	6.7	6.7
	S	40	66.7	66.7	73.3
	SS	16	26.7	26.7	100.0
	Total	60	100.0	100.0	

X17

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid TS	1	1.7	1.7	1.7
KS	4	6.7	6.7	8.3
S	39	65.0	65.0	73.3
SS	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X21

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ts	2	3.3	3.3	3.3
ks	9	15.0	15.0	18.3
s	34	56.7	56.7	75.0
ss	15	25.0	25.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X22

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	2	3.3	3.3	3.3
ts	2	3.3	3.3	6.7
ks	20	33.3	33.3	40.0
s	20	33.3	33.3	73.3
ss	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X23

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	5	8.3	8.3	8.3
ts	2	3.3	3.3	11.7
ks	21	35.0	35.0	46.7
s	26	43.3	43.3	90.0
ss	6	10.0	10.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X24

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	4	6.7	6.7	6.7
ts	3	5.0	5.0	11.7
ks	15	25.0	25.0	36.7
s	27	45.0	45.0	81.7
ss	11	18.3	18.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X25

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	2	3.3	3.3	3.3
ts	2	3.3	3.3	6.7
ks	7	11.7	11.7	18.3
s	32	53.3	53.3	71.7
ss	17	28.3	28.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X26

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ts	3	5.0	5.0	5.0
ks	7	11.7	11.7	16.7
s	32	53.3	53.3	70.0
ss	18	30.0	30.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X27

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	1	1.7	1.7	1.7
ts	2	3.3	3.3	5.0
ks	10	16.7	16.7	21.7
s	28	46.7	46.7	68.3
ss	19	31.7	31.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X28

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ts	3	5.0	5.0	5.0
ks	20	33.3	33.3	38.3
s	23	38.3	38.3	76.7
ss	14	23.3	23.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

X29

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid sts	1	1.7	1.7	1.7
ts	7	11.7	11.7	13.3
ks	16	26.7	26.7	40.0
s	27	45.0	45.0	85.0
ss	9	15.0	15.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ts	1	1.7	1.7	1.7
ks	4	6.7	6.7	8.3
s	39	65.0	65.0	73.3
ss	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ks	10	16.7	16.7	16.7
s	32	53.3	53.3	70.0
ss	18	30.0	30.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ks	8	13.3	13.3	13.3
s	32	53.3	53.3	66.7
ss	20	33.3	33.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ks	5	8.3	8.3	8.3
s	37	61.7	61.7	70.0
ss	18	30.0	30.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ks	2	3.3	3.3	3.3
s	42	70.0	70.0	73.3
ss	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ks	4	6.7	6.7	6.7
s	40	66.7	66.7	73.3
ss	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ks	14	23.3	23.3	23.3
s	33	55.0	55.0	78.3
ss	13	21.7	21.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ks	5	8.3	8.3	8.3
s	31	51.7	51.7	60.0
ss	24	40.0	40.0	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ts	1	1.7	1.7	1.7
ks	4	6.7	6.7	8.3
s	39	65.0	65.0	73.3
ss	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y10

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ts	3	5.0	5.0	5.0
ks	9	15.0	15.0	20.0
s	34	56.7	56.7	76.7
ss	14	23.3	23.3	100.0
Total	60	100.0	100.0	

Y11

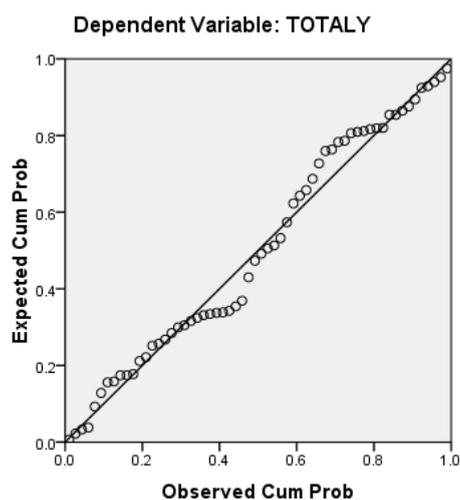
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid ts	1	1.7	1.7	1.7
ks	4	6.7	6.7	8.3
s	39	65.0	65.0	73.3
ss	16	26.7	26.7	100.0
Total	60	100.0	100.0	

**Tabel IV.9
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.568	5.617		8.290	.000
PENERAPAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	.319	.176	.089	3.676	.002
PENGAWASAN INTERNAL	.395	.320	.080	3.610	.003

a. Dependent Variable: KINERJA INSTANSI

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

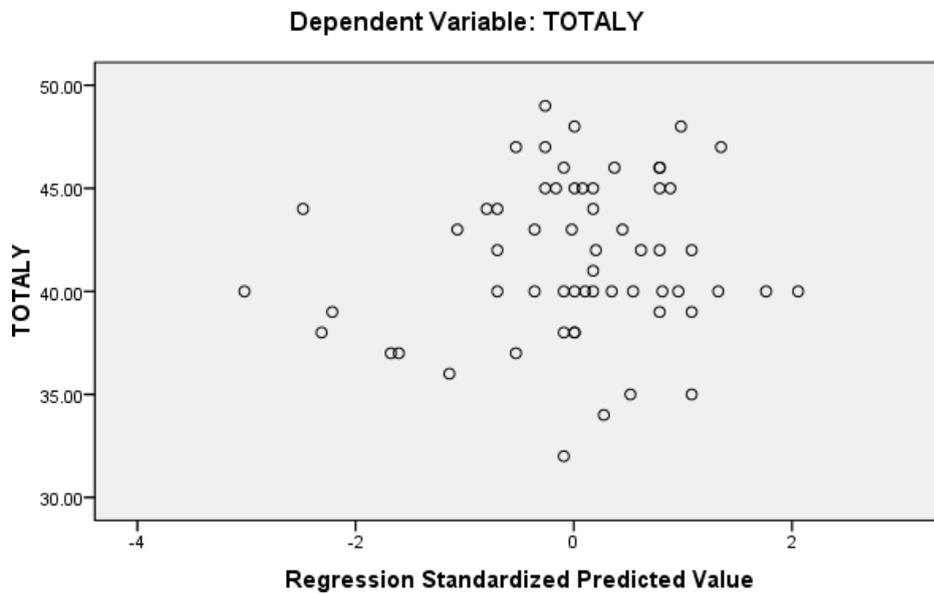


**Tabel IV.10
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	16.568	5.617			
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.319	.176	.089	.997	1.003
Pengawasan Internal	.395	.320	.080	.997	1.003

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi

Scatterplot



**Tabel IV.11
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	16.568	5.617		8.290	.000
Penerapan Akuntansi Sektor Publik	.319	.176	.089	3.676	.002
Pengawasan Internal	.395	.320	.080	3.610	.003

a. Dependent Variable: Kinerja Instansi

**Tabel IV.12
ANOVA^b**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	121.653	2	5.827	14.394	.000 ^a
	Residual	142.747	57	14.785		
	Total	154.400	59			

Tabel IV.13
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.417 ^a	.414	.321	2.84513

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Internal, Penerapan Akuntansi Sektor Publik

no	X1						totalx1	X2								
1	4	4	4	5	5	5	27	5	5	4	4	4	2	4	4	
2	4	4	4	5	5	5	27	3	4	5	4	2	4	4	4	
3	4	3	5	4	4	4	24	5	5	4	5	5	4	4	3	
4	4	3	5	4	4	4	24	5	5	3	4	5	4	4	3	
5	4	5	5	4	4	4	26	4	5	2	1	1	5	4	5	
6	5	5	4	4	4	4	26	4	5	3	3	5	3	5	5	
7	3	5	3	4	4	4	23	3	5	4	3	3	5	3	5	
8	5	5	4	4	4	4	26	4	5	4	5	4	5	5	5	
9	5	4	4	4	4	4	25	4	2	1	5	3	5	5	4	
10	5	3	3	4	4	4	23	2	1	5	4	1	3	5	3	
11	3	3	3	4	4	4	21	4	3	3	3	4	5	3	3	
12	5	5	4	4	4	4	26	5	5	5	5	5	5	5	5	
13	4	5	4	4	5	5	27	5	5	4	5	5	5	4	5	
14	5	5	4	5	4	5	28	5	5	4	5	5	4	5	5	
15	4	2	3	4	4	5	22	5	3	4	5	5	5	4	2	
16	4	4	4	3	3	3	21	3	5	3	3	4	4	4	4	
17	4	4	4	5	5	5	27	4	3	3	3	5	5	4	4	
18	5	4	4	5	4	4	26	4	3	4	3	5	4	5	4	
19	5	3	4	5	5	4	26	4	4	3	4	4	3	5	3	
20	4	5	4	4	5	5	27	4	2	1	3	5	4	4	5	
21	4	3	5	5	5	5	27	3	1	1	4	4	4	4	3	
22	5	4	2	4	4	4	23	4	4	3	4	5	4	5	4	
23	3	4	4	4	5	5	25	4	5	4	3	4	4	3	4	
24	3	3	3	4	3	3	19	4	5	4	3	4	5	3	3	
25	4	4	4	4	4	4	24	5	3	4	5	4	4	4	4	
26	4	4	1	5	4	4	22	5	4	3	4	4	4	4	4	

27	4	3	2	5	5	5	24	4	4	3	4	4	5	4	3
28	4	4	3	4	4	4	23	5	3	4	4	4	4	4	4
29	4	4	3	5	5	5	26	4	3	4	4	4	4	4	4
30	4	3	5	3	5	4	24	5	4	3	4	3	3	4	3
31	1	4	4	4	4	4	21	2	5	4	4	4	5	1	4
32	3	3	4	4	4	4	22	3	4	5	4	4	4	3	3
33	5	3	4	4	5	5	26	3	4	4	2	3	2	5	3
34	5	4	3	4	4	4	24	3	3	4	2	4	2	5	4
35	4	4	3	4	4	4	23	3	4	4	5	4	5	4	4
36	2	2	4	4	4	4	20	4	5	3	4	3	3	2	2
37	4	5	3	4	4	4	24	4	3	4	2	3	4	4	5
38	4	5	4	5	4	4	26	4	3	4	5	2	3	4	5
39	4	3	3	5	4	5	24	4	4	5	3	4	5	4	3
40	2	3	3	4	4	4	20	3	4	4	5	5	4	2	3
41	5	4	5	4	4	4	26	4	4	5	4	3	5	5	4
42	3	4	4	5	4	4	24	4	4	4	3	4	4	3	4
43	4	3	4	4	4	5	24	4	4	3	3	4	4	4	3
44	5	4	4	4	4	4	25	4	3	2	4	5	5	5	4
45	3	5	2	4	4	4	22	4	3	3	4	4	4	3	5
46	5	3	4	4	4	4	24	4	3	3	3	5	4	5	3
47	5	3	3	3	4	4	22	4	4	3	4	5	4	5	3
48	3	4	3	5	4	4	23	5	3	3	3	4	5	3	4
49	3	4	5	5	5	4	26	4	3	3	4	4	5	3	4
50	3	4	5	5	5	5	27	4	3	4	4	4	4	3	4
51	4	4	3	4	4	4	23	4	4	3	4	4	4	4	4
52	5	3	5	4	4	4	25	5	3	3	4	4	4	5	3

53	5	5	2	4	4	4	24	4	3	1	
54	5	5	2	4	4	3	23	4	4	3	
55	5	5	2	4	4	4	24	4	3	1	
56	4	4	4	3	4	3	22	5	4	3	
57	4	3	2	3	4	4	20	4	4	4	
58	4	2	3	5	5	4	23	4	5	4	
59	4	3	4	4	4	4	23	5	4	4	
60	4	3	4	5	5	5	26	4	3	4	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2271/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/31/5/2021

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Medan, 31/5/2021

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fildzah ikrami
NPM : 1705170287
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi sektor publik

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : 1. Konsep akuntabilitas sektor publik belum mampu diterapkan secara konsisten, hal ini disebabkan kurangnya ketepatan dan kepedulian dalam penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. kurangnya rasa kesadaran serata tanggung jawab pegawai terhadap penyelesaian pekerjaan yang belum sesuai instansi.
3. penerapan sistem pengawasan internal dan penyelenggaraan yang tidak terbuka untuk publik.

Rencana Judul : 1. Pengaruh pemahaman standart akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pengaruh penerapan standart akuntansi pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan.
3. Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah daerah.

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Camat Siantar Timur

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Fildzah ikrami)



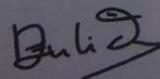
MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kaptan Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN PROPOSAL

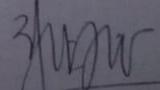
Nama Mahasiswa : Fildzah Ikrami
NPM : 1705170287
Dosen Pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Penelitian : Pengaruh penerapan akuntansi sektor publik dan Pengawasan internal terhadap kinerja instansi pemerintah (Studi empiris pada kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar)

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	1. Fenomena masalah harus di dukung data dan harus di jelaskan di latar belakang penelitian. 2. Tujuan penelitian harus sinkron dengan rumusan masalah.	20 Agustus 2021	2/
Bab 2	1. Teori tentang variabel yang di teliti harus rinci Buang yang tidak perlu 2. Kerangka konseptual harus di dukung artikel penelitian dan teori minimal 5 artikel	20 Agustus 2021	3/
Bab 3	Jumlah sampel ada berapa orang	20 Agustus 2021	4/
Daftar Pustaka	Gunakan Mandeleley	20 Agustus 2021	2/
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	OKE	20 Agustus 2021	3/
Persetujuan Seminar Proposal	ACC SEMINAR PROPOSAL	21 September 2021	3/

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


(Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

Medan, 21 September 2021
Disetujui oleh:
Dosen Pembimbing


(Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si)



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

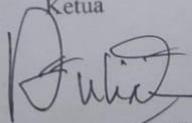
Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Jumat, 01 Oktober 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Fildzah Ikrami
NPM : 1705170287
Tempat / Tgl.Lahir : Pematangsiantar, 24 Oktober 1999
Alamat Rumah : Jl.Melanthon Siregar Gg.Imam Pematangsiantar
Judul Proposal : Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing : Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

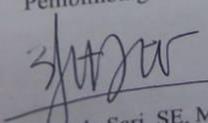
Medan, 01 Oktober 2021

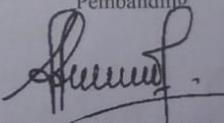
TIM SEMINAR

Ketua

Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., M.Si

Pembimbing

Dr. Eka Nurmala Sari, SE, M.Si

Pemanding

Seprida Hanum Harahap, SE., SS., M.Si

Diketahui / Disetujui
a.n.Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Ade Gunawan, SE, M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : FILDZAH IKRAMI
NPM : 1705170287
Tempat/Tanggal Lahir : Pematangsiantar, 24 Oktober 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke : 3 dari 3 bersaudara
Alamat : Jl. Cemara Gg. Rambutan No. 28 A P.Brayan Darat II Medan
Nomor HP : 082166619033

Data Orang Tua

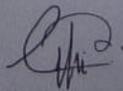
Nama Ayah : SYAFRUDDIN
Pekerjaan : Purnarirawan
Nama Ibu : SAMSIDAR PERANGIN-ANGIN
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Melanthon Siregar Gg. Imam Pematangsiantar
No Hp : 085261044003

Data Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : MIS Tarbiatul Islamiyah Pematangsiantar
Sekolah Menengah Pertama : MTsN Pematangsiantar
Sekolah Menengah Tingkat Atas : SMAN 2 Pematangsiantar
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 18 November 2021



Fildzah Ikrami